

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LAKIP)
TAHUN 2018**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, serta terselesaikannya penyusunan LAKIP 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yaitu transparan, partisipasi dan akuntabilitas.

LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018.

Putussibau, 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH,

H. SARBANI, SE.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA	
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	8
B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	13
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran	29
BAB IV : PENUTUP	37

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

LAMPIRAN 1: STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN 2: PERJANJIAN KINERJA

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP tahun 2018 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi

pemerintah dinyatakan bahwa Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan berada di bawah serta bertanggungjawab langsung Kepala Daerah. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut (bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terlampir) :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Sekretaris Daerah
- c. Kepala Bagian
- d. Kepala Sub Bagian
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris Daerah dibantu 3 (tiga) orang Asisten yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi dan Umum. Adapun ruang lingkup tugas Asisten Sekretaris Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan, dibantu oleh :
 - 1) Bagian Pemerintahan
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Hubungan Kelembagaan dan Perangkat Daerah;
 - c) Sub Bagian Perwakilan.
 - 2) Bagian Hukum
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi.
 - 3) Bagian Pertanahan
 - a) Subbagian Inventarisasi dan Administrasi Pertanahan;
 - b) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan.

- 4) Bagian Kesatuan Bangsa
 - a) Sub Bagian Pembinaan Wawasan Kebangsaan
 - b) Sub Bagian Ketahanan Sosial
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dibantu oleh :
 - 1) Bagian Perekonomian
 - a) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Produksi;
 - 2) Bagian Pengendalian Pembangunan
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b) Sub Bagian Agama dan Budaya.
- c. Asisten Administrasi dan Umum, dibantu oleh :
 - 1) Bagian Organisasi
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana;
 - c) Sub Bagian Aparatur.
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat
 - a) Subbagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Subbagian Protokol.
 - 3) Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Subbagian Aparatur dan Tata Usaha.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Daerah;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah;
- d. pemberian petunjuk teknis terhadap kegiatan perangkat daerah;
- e. pembinaan dan pendayagunaan aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- f. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah serta menyampaikannya kepada Bupati;
- g. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah secara periodik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Keberhasilan suatu organisasi atau unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sangat ditentukan oleh jumlah aparatur yang tersedia baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara keseluruhan jumlah aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 140 orang dan jumlah tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 56 orang.

Komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan / Ruang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1, Keadaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Pendidikan:

TINGKAT PENDIDIKAN									JML
SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	3	43	-	0	15	9	45	25	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	3	43	-	0	15	9	45	25	140

Sumber: Subbagian Personil dan Tata Usaha

Tabel 2, Keadaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Menurut Golongan/Ruang:

GOLONGAN / RUANG													JML
1/c	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	5	18	7	32	25	22	10	4	8	5	1	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	5	18	7	32	25	22	10	4	8	5	1	140

Sumber: Subbagian Personil dan Tata Usaha

Tabel 3, Keadaan Sumber Daya Tenaga Kontrak Menurut Tingkat Pendidikan:

TINGKAT PENDIDIKAN									JML
SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	40	-	1	2	0	9	0	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	40	-	1	2	0	9	0	56

Sumber: Subbagian Personil dan Tata Usaha

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan yang berupa tersedianya dana/anggaran setiap tahunnya merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Sekretariat Daerah. Secara umum bahwa dukungan

sumber daya keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama ini sangat mencukupi untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

6. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan sarana dan prasarana yang terdiri dari :

Tabel 4, Keadaan Sarana dan Prasarana:

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor : a. Ruang Kerja Staf b. Ruang Pimpinan c. Gudang d. Toilet	37 buah 18 buah 2 buah 10 buah
2.	Kendaraan : a. Kendaraan Roda Dua b. Kendaraan Roda Empat	98 unit 31 unit
3.	Sarana Pendukung dan Perlengkapan lainnya : a. Komputer b. Mesin Tik c. Pesawat Telepon/Faximile d. Kursi Rapat e. Meja Rapat f. CPU g. Printer h. Meja Kerja 1 Biro i. Meja Kerja 1/2 Biro j. Kursi Kerja	32 unit 18 unit 27 unit 96 unit 11 unit 30 unit 52 unit 24 unit 82 unit 10 unit

Sumber : Subbagian Perlengkapan

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, setidaknya sampai dengan tahun 2018. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang. Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap Satuan Kerja Perangkat belum optimal;
2. Organisasi perangkat Kabupaten Kapuas Hulu belum tepat fungsi dan tepat ukur (*right sizing*);
3. Sistem dan prosedur kerja birokrasi belum efektif dan efisien;
4. Inkonsistensi dalam penetapan peraturan perundang-undangan;
5. Sistem perencanaan, penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja belum terintegrasi secara sinergi;
6. Pengembangan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum optimal;
7. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur;
8. Sistem penilaian kinerja dalam penerapan reward and punishment belum optimal.

Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang untuk dimanfaatkan secara luas termasuk dalam pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal peningkatan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dapat didukung oleh penerapan pelayanan kepada publik secara efektif dan efisien. Pelayanan publik yang didukung oleh teknologi informasi dalam lingkup pemerintahan dikenal dengan istilah Electronic-Government. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan bertujuan agar terbentuk Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, serta perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategisnya.

A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan organisasi.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Sekretaris Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin tiga tolok ukur, yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

Agar Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan

etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 merupakan implementasi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2016 – 2021, sebagai tolok ukur pelaporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu akan diarahkan dan apa yang akan dicapai.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka dirumuskan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

“PROFESIONAL DALAM KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PELAYANAN GUNA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

- (1) **Profesional** dalam visi tersebut mencerminkan rangkaian tindakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah untuk dilakukan atau tidak dilakukan didasarkan atas pertimbangan prinsip-prinsip rasionalitas keilmuan dan etika.
- (2) **Koordinasi** yang baik adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berupaya menciptakan dan membentuk pola koordinasi yang terpadu, tepat, cepat dan sistematis antar OPD dan Instansi/lembaga lainnya dalam meningkatkan sinergitas penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan.
- (3) **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menerapkan azas-azas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta menjaga keseimbangan unsur-unsur pemerintahan, privat dan civil society sebagai komponen pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

2. Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Selaras dengan gambaran masa depan dari Visi Sekretaris Daerah yaitu Terwujudnya Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Organisasi yang Profesional dalam Koordinasi dan Pelayanan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan Administratif;**
- 2) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (good governance);**
- 3) Mewujudkan Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional.**

Keberadaan ketiga misi tersebut memiliki nilai strategis karena akan menciptakan sinergitas positif untuk mendukung tercapainya visi yang telah ditetapkan. Upaya mewujudkan kualitas pelayanan administratif pemerintah yang tertib, akuntabel dan berkeadilan, serta membangun tata kelola pemerintah yang baik dan diselenggarakan dengan prinsi-prinsip transparansi, partisipasi, demokrasi, akuntabilitas, efesien, responsif serta mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah yang efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Kemudian Sasaran adalah penjabaran dari Tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau triwulanan.

Berdasarkan dari Misi Mewujudkan peningkatan kualitas pembinaan dan pelayanan administratif, ditetapkan satu Tujuan yaitu Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Sekretariat Daerah, Dari Tujuan tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran berupa Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Sekretariat Daerah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dan meningkatnya tertib administrasi.

Selanjutnya dari Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good governance) ditetapkan tujuan yaitu Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas. Dari Tujuan tersebut ditetapkan 5 (lima)

sasaran yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatnya sektor perekonomian daerah, Meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama, Meningkatkan pengelolaan dan pengamanan pertanahan, dan meningkatkan sistem komunikasi, informasi dan media massa.

Kemudian untuk Misi Mewujudkan Koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang cermat dan akuntabel ditetapkan Tujuan yaitu Mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah yang efektif, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari tujuan tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan sistem koordinasi dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan keterpaduan antar satuan kerja.

Secara utuh pemaparan dari Tujuan dan Sasaran dari masing-masing Misi tertuang dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5. Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama

MISI	TUJUAN	SASARAN	IKU
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pelayanan Administratif	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Kelembagaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah	- persentase kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional
		Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Sekretariat Daerah	- persentase peningkatan disiplin aparatur - Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur
Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang Baik (good governance)	Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	- Terpenuhinya Sistem Pelaporan, Kinerja dan Keuangan sesuai Pedoman
			- Tingkat efektifitas dan efisiensi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
			- Persentase Pemanfaatan teknologi informasi di sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu
			- Jumlah SKPD yang terdampingi dan terbina dalam penyusunan LPPD

		Meningkatnya sektor perekonomian daerah	- Terselenggaranya manajemen perusahaan daerah yang baik
			- Jumlah Kegiatan Fasilitasi Event Promosi potensi Produk Unggulan dan Investasi Kabupaten Kapuas Hulu untuk Menarik Minat Investor
		Meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan kerukunan kehidupan beragama	- Jumlah SKPD/Instansi terkait dan elemen masyarakat yang dilibatkan dalam rangkaian pelaksanaan Harkitnas
			- Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP
			- Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan
			- persentase fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan pendidikan
			- Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
		Meningkatnya Pengelolaan dan pengamanan pertanahan	- luas lahan bersertifikat
			- Penyelesaian kasus tanah negara
		Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa	- Persentase Penyebaran informasi Penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat
Mewujudkan Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Profesional	Mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah yang efektif, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Meningkatkan sistem koordinasi dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan keterpaduan antar satuan kerja	- Jumlah Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan
			- Optimalisasi Lembaga Pelayanan Publik
			- Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMD
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah Produk hukum yang ditetapkan
			- Persentase Peningkatan kepastian Hukum dan Pemenuhan HAM
			- Persentase Peningkatan Kesadaran, ketaatan dan kepatuhan Hukum di Kabupaten Kapuas Hulu

B. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Perjanjian Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2018. Perjanjian kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator inputs, outputs dan outcomes. Dokumen Perjanjian Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Adapun perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan terlebih dahulu melaksanakan *Review Renstra* dan IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil pengukuran atas IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 menunjukkan hasil sesuai data.

TABEL 6. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI KINERJA	%
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah	- persentase kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan	100%	100%	100
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional	100%	100%	100
3	Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Sekretariat Daerah	- Persentase kegiatan peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100
		- Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100
4	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	- Terpenuhinya Sistem Pelaporan, Kinerja dan Keuangan sesuai Pedoman	18 laporan	18 laporan	100
		- Tingkat efektifitas dan efisiensi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	100%	100%	100
		- Persentase Pemanfaatan teknologi informasi di sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu	100%	100%	100
		- Jumlah SKPD yang terdampingi dan terbina dalam penyusunan LPPD	46 SKPD	46 SKPD	100
5	Meningkatnya sektor perekonomian daerah	- Terselenggaranya manajemen perusahaan daerah yang baik	100%	100%	100
		- Jumlah Kegiatan Fasilitasi Event Promosi potensi Produk Unggulan dan Investasi Kabupaten Kapuas Hulu untuk Menarik Minat Investor	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100

6	Meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan kerukunan kehidupan beragama	-	Jumlah SKPD/Instansi terkait dan elemen masyarakat yang dilibatkan dalam rangkaian pelaksanaan Harkitnas	35 SKPD	35 SKPD	100
		-	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP	2 kegiatan	2 kegiatan	100
		-	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan	100%	100%	100
		-	persentase fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan pendidikan	100%	100%	100
		-	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100%	100%	100
7	Meningkatnya Pengelolaan dan pengamanan pertanahan	-	luas lahan bersertifikat	100%	100%	100
		-	Penyelesaian kasus tanah Negara	100%	100%	100
8	Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa	-	Persentase Penyebaran informasi Penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat	100%	100%	100
9	Meningkatkan sistem koordinasi dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan keterpaduan antar satuan kerja	-	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
		-	Optimalisasi Lembaga Pelayanan Publik	2 kasus	2 kasus	100
		-	Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMD	3 kali	3 kali	100
10	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	-	Jumlah Produk hukum yang ditetapkan	730 produk	730 produk	100
		-	Persentase Peningkatan kepastian Hukum dan Pemenuhan HAM	100%	100%	100
		-	Persentase Peningkatan Kesadaran, ketaatan dan kepatuhan Hukum di Kabupaten Kapuas Hulu	100%	100%	100

Sasaran 1. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah

Dari matrik di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah dengan indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 100% dan tergolong sukses. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah persentase kelancaran dalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan. Target yang ditentukan sebesar 100 % yaitu terdiri dari 28 kegiatan, realisasi kelancaran dalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan dilingkungan Sekretariat Daerah yaitu sesuai target sebanyak 28 kegiatan berjalan dengan lancar dan sasaran ini tergolong sangat berhasil.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah ditunjang melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
14. Penyediaan Makanan dan Minuman
15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
16. Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
17. Penyediaan administrasi pengadaan barang/jasa
18. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD
19. Penyusunan RKA dan DPA SKPD

20. Penyediaan Perlengkapan Informasi dan Dokumentasi
21. Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI
22. Peningkatan Jasa Tenaga Pendukung Telekomunikasi Daerah
23. Pemutakhiran Data Infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu (Upgrade dan Updating Data Fasilitas infrastruktur Dasar)
24. Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau
25. Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Prov. Kalimantan Barat
26. Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah
27. Fasilitasi Penyelenggaraan Apel Rutin SKPD
28. Penyediaan Pelayanan Kesehatan

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

Dari matrik di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 100% dan tergolong sukses. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Operasional. Target yang ditentukan sebesar 100 % yaitu 13 item sarana dan prasarana akan ditingkatkan, realisasi Peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana dilingkungan Sekretariat Daerah sesuai target, 13 item sarana dan prasarana yang direncanakan telah ditingkatkan dan sasaran ini tergolong sangat berhasil.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ditunjang melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
3. Pengadaan Mebeulair
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan
5. Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
9. Penyediaan Jasa Sewa Rumah Jabatan
10. Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Kantor
11. Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Fasilitas Umum
12. Penyediaan Fasilitas Rumah Jabatan
13. Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor

Sasaran 3. Meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Sekretariat Daerah

Dari matrik di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terjadi peningkatan kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Sekretariat Daerah dengan indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 100% dan tergolong sukses. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut yaitu :

1. persentase kegiatan peningkatan disiplin aparatur

Target yang ditentukan yaitu 1 kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan, realisasi peningkatan disiplin aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah yaitu sesuai target 100% tercapai dan sasaran ini tergolong sangat berhasil.

2. Pelaksanaan Bimtek Peningkatan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur

Target yang ditentukan yaitu 100 % terdiri dari tiga kegiatan, realisasi pelaksanaan bimtek peningkatan pengetahuan sumber daya aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah sesuai target yaitu 100%, 3 kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dan sasaran ini tergolong sangat berhasil.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kompetensi, komitmen dan kapabilitas aparatur Sekretariat Daerah ditunjang kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan
2. Pendidikan dan pelatihan formal
3. Pelaksanaan Rapat Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian

4. Bimtek Analisis jabatan dan beban kerja

Sasaran 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

Dari matrik di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 100% dan tergolong sukses. Indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut yaitu :

1. Terpenuhinya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan sesuai Pedoman.

Target yang ditentukan yaitu 18 laporan, realisasi pemenuhan sistem pelaporan kinerja dan keuangan sesuai pedoman dilingkungan Sekretariat Daerah sesuai target yaitu 100%, 18 laporan terpenuhi dan sasaran ini tergolong sangat berhasil.

2. Tingkat efektifitas dan efisiensi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Target yang ditentukan yaitu 100%, realisasi terhadap efektifitas dan efisiensi program pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai target yaitu 100 % kegiatan pengendalian dan evaluasi pembangunan dilakukan dengan efektif dan efisien dan sasaran ini tergolong berhasil.

3. Persentase Pemanfaatan teknologi informasi di sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Target yang ditentukan yaitu 100%, realisasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai target, yaitu 100 % teknologi informasi yang ada dimanfaatkan dan sasaran ini tergolong berhasil.

4. Jumlah SKPD yang terdampingi dan terbina dalam penyusunan LPPD.

Target yang ditentukan yaitu sebanyak 46 SKPD memperoleh pendampingan dan pembinaan, realisasi pendampingan dan pembinaan dalam penyusunan LPPD sesuai target, yaitu 100 % SKPD mendapatkan pelayanan tersebut dan sasaran ini tergolong berhasil.

Capaian kinerja sasaran meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat Daerah
2. Penyusunan laporan semesteran SKPD
3. Finalisasi laporan keuangan berdasar- kan Hasil Pemeriksaan BPK khusus Sekretariat Daerah
4. Penyusunan LAKIP Kab. Kapuas Hulu
5. Penyusunan Renstra SKPD
6. Penyusunan jurnal dan buku besar Sekretariat Daerah
7. Penyusunan Formasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan
9. Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD
10. penyusunan rencana kerja SKPD
11. Pelaksanaan Standar Kompetensi Jabatan
12. Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan Publik
13. Survey indeks kepuasan masyarakat
14. Penataan Perangkat Daerah
15. Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan
16. Penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan
17. Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi
18. Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
19. Fasilitasi dan evaluasi pengadaan barang dan jasa di desa
20. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Setda
21. Peliputan ekspose, pendampingan dan pendokumentasian kegiatan pemerintah
22. Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pembangunan dan Kunjungan Kerja Bagian Pengendalian Pembangunan
23. Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Bidang Kehumasan
24. Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa
25. Pembinaan dan pengawasan penyaluran raskin di kabupaten kapuas hulu
26. Pengendalian Inflasi Daerah
27. Fasilitasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Bina Produksi Bidang Perekonomian
28. Percepatan dan pengendalian kegiatan pembangunan kab .kapuas hulu
29. pembinaan dan pengawasan BUMD
30. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyaluran Penggunaan Dana Tidak Terduga
31. Inventarisasi Peluang Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
32. Pembinaan Sarana dan Prasarana Perekonomian
33. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
34. Pelayanan Keprotokolan Pimpinan Kepala Daerah dan Kepala Daerah

35. Fasilitasi Pelaksanaan ULP
36. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Pada Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

Sasaran 5. Meningkatnya sektor perekonomian daerah

Dari matrik di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya sektor perekonomian daerah dengan indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 100% dan tergolong sukses. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut yaitu:

1. Terselenggaranya manajemen perusahaan daerah yang baik.

Target yang ditentukan yaitu 100% terdiri dari 3 perusahaan, realisasi penyelenggaraan manajemen perusahaan daerah sesuai target, yaitu 100 % perusahaan daerah memiliki manajemen yang baik dan capaian ini dikatakan sukses.

2. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Event Promosi potensi Produk Unggulan dan Investasi Kabupaten Kapuas Hulu untuk Menarik Minat Investor.

Target yang ditentukan yaitu sebanyak 3 kegiatan, realisasi kegiatan fasilitasi event promosi potensi produk unggulan dan investasi Kabupaten Kapuas Hulu untuk menarik minat investor sesuai target, yaitu 100 % kegiatan dapat dilaksanakan dan capaian ini terbilang sukses.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya sektor perekonomian daerah didukung kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Fasilitasi Rapat - Rapat Pengembangan BUMD
2. Fasilitasi Penyusunan kebijakan penyertaan modal daerah
3. Inventarisasi Peluang Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
4. Fasilitasi Pengembangan Promosi produk unggulan daerah

Sasaran 6. Meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan kerukunan kehidupan beragama

Dari matrik di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan kerukunan kehidupan beragama dengan indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 100% dan tergolong sukses. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut yaitu:

1. Jumlah SKPD/Instansi terkait dan elemen masyarakat yang dilibatkan dalam rangkaian pelaksanaan Harkitnas

Target yang ditentukan yaitu 35 SKPD terlibat dalam kegiatan, realisasi terhadap Jumlah SKPD/Instansi terkait dan elemen masyarakat yang dilibatkan dalam rangkaian pelaksanaan Harkitnas sesuai target yaitu 100 %, sasaran ini tergolong berhasil.

2. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP

Target yang ditentukan yaitu 2 kegiatan dapat dilaksanakan, realisasi terhadap Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP sesuai target yaitu 100 %, sasaran ini tergolong berhasil.

3. Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan

Target yang ditentukan yaitu 100% terdiri dari 8 agenda, realisasi fasilitasi kegiatan keagamaan sesuai target yaitu 100 % kegiatan dapat difasilitasi dan capaian ini terbilang sukses.

4. persentase fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan pendidikan

Target yang ditentukan yaitu 100% terdiri dari 15 kegiatan, realisasi fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan pendidikan sesuai target, yaitu 100 % kegiatan dapat difasilitasi dan capaian ini terbilang sukses.

5. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

Target yang ditentukan yaitu 100% pelanggaran dapat diselesaikan, realisasi Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten sesuai target, yaitu 100 % pelanggaran dapat diselesaikan dan capaian ini terbilang sukses.

Capaian kinerja sasaran meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan kerukunan kehidupan beragama didukung kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan Jaringan FKDM
2. Fasilitasi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
3. Fasilitasi Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
4. Penguatan Tim Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
5. Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dan Cinta Tanah Air
7. Pembinaan Ormas, OKP dan LSM
8. Tim Pemeriksaan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
9. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama
10. Pembinaan Usaha kesehatan sekolah
11. Monitoring dan evaluasi bidang Sosial
12. Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji
13. Fasilitasi penerimaan Mahasiswa Beasiswa Kedokteran
14. Penyelenggaraan rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat
15. Penyelenggaraan Senam Pagi di Lingkungan Sekretariat Daerah
16. Kegiatan penunjang hibah dan bansos
17. kegiatan keagamaan dan kebudayaan
18. Fasilitas Pelaksanaan Halal Bi Halal
19. Fasilitas Pelaksanaan Ibadah Haji
20. Buka Puasa bersama
21. Fasilitas Ziarah dan umrah
22. Antar jemput jamaah haji

23. Penunjang kegiatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lainnya
24. Bimbingan Teknis Kesehatan Sekolah
25. Pencegahan dan Deteksi Dini AGHT (KOMINDA)

Sasaran 7. Meningkatnya Pengelolaan dan pengamanan pertanahan

Dari matrik di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pengelolaan dan pengamanan pertanahan dengan indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 100% dan tergolong sukses. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut yaitu:

1. luas lahan bersertifikat

Target yang ditentukan yaitu 100% lahan pemerintah bersertifikat, realisasi kegiatan sertifikasi lahan sesuai target, yaitu 100 % lahan bersertifikat dan capaian ini terbilang sukses.

2. Penyelesaian kasus tanah negara

Target yang ditentukan yaitu 100% yaitu fasilitasi penyelesaian kasus tanah Negara dapat terlaksana, realisasi penyelesaian kasus tanah Negara sesuai target, yaitu 100 % kasus dapat terselesaikan dan capaian ini terbilang sukses.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Pengelolaan dan pengamanan pertanahan didukung kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Tanah keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Monitoring dan evaluasi tanah Pemkab kab kh
3. Pengurusan sertifikasi Tanah Pemkab.Kh
4. Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah
5. Fasilitasi Penataan Batas Antar Kabupaten dan Batas Kecamatan
6. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Sasaran 8. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa

Dari matrik di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan sistem komunikasi, informasi dan media masa dengan indikator kinerja

sasaran memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 100% dan tergolong sukses. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut yaitu Persentase Penyebaran informasi Penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa didukung kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Kerjasama Berita dengan media cetak
2. Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan
3. Pencitraan dan Publikasi Pemerintah

Sasaran 9. Meningkatkan sistem koordinasi dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan keterpaduan antar satuan kerja

Dari matrik di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan sistem koordinasi dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan keterpaduan antar satuan kerja dengan indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 100% dan tergolong sukses. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut yaitu:

1. Jumlah Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan

Target yang ditentukan yaitu 1 kali kegiatan fasilitasi dapat terlaksana, realisasi Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan sesuai target 100%, yaitu 1 kali kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan terlaksana dan capaian ini terbilang sukses.

2. Optimalisasi Lembaga Pelayanan Publik

Target yang ditentukan yaitu dua kasus teratasi, realisasi optimalisasi lembaga pelayanan publik sesuai target 100%, yaitu kasus yang ada teratasi sehingga lembaga pelayanan publik dapat teroptimalkan dan capaian ini terbilang sukses.

3. Jumlah Kegiatan Pembinaan BUMD

Target yang ditentukan yaitu tiga kali pelaksanaan kegiatan pembinaan, realisasi kegiatan pembinaan BUMD sesuai target 100%, yaitu tiga kali kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan dan capaian ini terbilang sukses.

Capaian kinerja sasaran meningkatkan sistem koordinasi dan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan keterpaduan antar satuan kerja didukung kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat-rapat Koordinasi Bidang Pembangunan dan Kunjungan Kerja Bagian Pengendalian Pembangunan
2. Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Bidang Kehumasan
3. Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa
4. Pengendalian Inflasi Daerah
5. Pembinaan dan pengawasan penyaluran raskin di kabupaten kapuas hulu
6. Fasilitasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Bina Produksi Bidang Perekonomian
7. Pembinaan Sarana dan Prasarana Perekonomian
8. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Pada Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
9. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Setda
10. Peliputan ekspose, pendampingan dan pendokumentasian kegiatan pemerintah
11. pembinaan dan pengawasan BUMD

Sasaran 10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

Dari matrik di atas dapat dijelaskan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sasaran sebesar 100% dan tergolong sukses. Adapun indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran tersebut yaitu:

1. Jumlah Produk hukum yang ditetapkan

Target yang ditentukan yaitu tujuh ratus tiga puluh produk hukum ditetapkan, realisasi penetapan produk hukum sesuai target, yaitu tujuh ratus tiga puluh produk hukum telah ditetapkan dan capaian ini terbilang sukses.

2. Persentase Peningkatan kepastian Hukum dan Pemenuhan HAM

Target yang ditentukan yaitu 100% kepastian hukum dan pemenuhan HAM dapat ditingkatkan, realisasi Peningkatan kepastian Hukum dan Pemenuhan HAM sesuai target dan capaian ini terbilang sukses.

Capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan didukung kegiatan – kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
2. Legislasi Peraturan Perundang-Undangan
3. Pendokumentasian produk hukum daerah
4. Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7, Realisasi Anggaran Tahun 2018 Per Program
 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	20.469.435.150	19.598.819.304	95,75
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49.365.000	49.250.000	99,77
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	3.078.324.000	2.654.320.391	86,23
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	327.000.000	330.100.000	100,95
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional	100.000.000	47.621.000	47,62
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	188.280.000	175.530.000	93,23
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	441.500.000	441.033.600	99,89
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	161.500.000	141.590.000	87,67
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	226.534.650	226.529.829	99,99

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	504.050.000	504.033.300	99,99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	127.000.000	126.914.875	99,93
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.188.500.000	1.167.769.000	98,26
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	637.500.000	616.175.000	96,65
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	204.600.000	176.449.000	86,24
	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.242.300.000	2.237.386.500	99,78
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4.688.500.000	4.687.115.327	99,97
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	2.021.500.000	2.021.169.000	99,98
	Penyediaan administrasi pengadaan barang/jasa	1.405.043.500	1.391.959.982	99,07
	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan SKPD	1.472.541.000	1.241.793.000	84,32
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	18.850.000	18.850.000	100,00
	Penyediaan Perlengkapan Informasi dan Dokumentasi	199.500.000	199.200.000	99,85
	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT RI	397.870.000	386.652.000	97,18
	Peningkatan Jasa Tenaga Pendukung Telekomunikasi Daerah	318.558.000	286.758.500	90,02
	Penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kota Putussibau	204.401.000	204.401.000	100,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan HUT Prov. Kalimantan Barat	76.764.000	76.764.000	100,00
	Penyelenggaraan Peringatan Hari Otonomi Daerah	93.454.000	93.454.000	100,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Apel Rutin SKPD	96.000.000	96.000.000	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.872.039.000	8.331.133.179	93,90
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	1.083.000.000	750.462.000	69,29
	Pengadaan Mebeulair	207.500.000	207.490.000	99,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Rumah Jabatan	284.500.000	284.482.000	99,99
	Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan	594.386.000	592.261.000	99,64
	Pemeliharaan Rutin / Berkala	55.000.000	49.632.800	90,24

	Gedung Kantor			
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	4.800.000.000	4.763.109.379	99,23
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	915.000.000	824.533.000	90,11
	Penyediaan Jasa Sewa Rumah Jabatan	80.000.000	63.000.000	78,75
	Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Kantor	737.153.000	682.937.000	92,65
	Rehabilitasi Sedang / Berat gedung Fasilitas Umum	115.500.000	113.226.000	98,03
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	182.000.000	181.935.000	99,96
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	100.500.000	100.435.000	99,94
	Pengadan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu	81.500.000	81.500.000	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	918.550.200	815.602.726	88,79
	Pendidikan dan pelatihan formal	918.550.200	815.602.726	88,79
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	2.043.402.000	2.013.002.309	98,51
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat Daerah	8.642.000	8.642.000	100,00
	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran SKPD	11.885.000	11.885.000	100,00
	Finalisasi laporan keuangan berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK khusus Sekretariat Daerah	110.931.000	110.490.300	99,60
	Penyusunan LAKIP Kab. Kapuas Hulu	447.415.500	444.634.427	99,38
	Penyusunan jurnal dan buku besar Sekretariat Daerah	7.742.000	7.742.000	100,00
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	28.735.000	28.735.000	100,00
	Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan SKPD	183.826.500	169.328.982	92,11
	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	723.480.000	715.579.000	98,91
	Pemeliharaan Komputerisasi Keuangan Dan Akuntansi Instansi	167.200.000	167.200.000	100,00
	penyusunan rencana kerja SKPD	8.547.000	8.547.000	100,00
	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	81.520.000	79.885.300	97,99

	Pengembangan Sistem Aplikasi Data Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	191.500.000	190.000.000	99,21
	Penyusunan Laporan Penerapan dan Percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	71.978.000	70.333.300	97,71
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2.209.892.000	2.156.056.926	97,56
	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	27.790.000	27.624.000	99,40
	Peliputan ekspose, pendampingan dan pendokumentasian kegiatan pemerintah	545.380.000	530.064.859	97,19
	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja Bidang Kehumasan	298.652.000	298.414.350	99,92
	Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa	346.356.000	340.886.669	98,42
	Pembinaan dan pengawasan penyaluran raskin di kabupaten kapuas hulu	208.894.000	194.369.425	93,05
	Pengendalian Inflasi Daerah	167.470.000	163.372.300	97,55
	Fasilitasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Bina Produksi Bidang Perekonomian	221.950.000	220.854.275	99,51
	pembinaan dan pengawasan BUMD	181.370.000	175.423.098	96,72
	Pembinaan Sarana dan Prasarana Perekonomian	212.030.000	205.047.950	96,71
7	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	517.015.000	515.129.325	99,64
	Pelayanan Keprotokolan Pimpinan Kepala Daerah dan Kepala Daerah	517.015.000	515.129.325	99,64
8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	792.481.000	765.308.944	96,57
	Fasilitasi Pelaksanaan ULP	792.481.000	765.308.944	96,57
9	Program Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	1.341.540.700	1.309.231.423	97,59
	Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	221.712.200	220.311.719	99,37
	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisa Jabatan di	202.263.500	199.432.400	98,60

	Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapas Hulu			
	Optimalisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	201.632.000	201.170.902	99,77
	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kab. Kapuas Hulu	127.144.000	123.938.602	97,48
	Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	176.684.000	153.306.969	86,77
	Penyusunan Formasi ASN Kabupaten Kapuas Hulu	165.989.000	165.126.100	99,48
	Pelaksanaan Rapat Teknis Bidang Organisasi dan Kepegawaian	246.116.000	245.944.731	99,93
10	Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah	112.562.000	112.551.046	99,99
	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Pada Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	112.562.000	112.551.046	99,99
11	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.469.507.000	1.277.481.552	86,93
	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	218.976.000	218.154.400	99,62
	Legislasi Peraturan Perundang-Undangan	258.213.000	255.630.700	98,99
	Pendokumentasian produk hukum daerah	78.157.500	59.625.000	76,29
	Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)	129.702.500	87.239.952	67,26
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	310.959.500	260.292.000	83,70
	Monitoring dan Evaluasi Peraturan Desa di Kab. KH	81.154.000	58.524.000	72,11
	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kab.Kapuas Hulu	228.013.500	185.059.500	81,16
	Fasilitasi Pendampingan Hukum Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	31.975.000	26.801.000	83,81
	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kapuas Hulu	132.356.000	126.155.000	95,31
12	Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	1.191.991.150	1.094.027.582	91,78

	Pemuktahiran Data Infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu	158.019.000	157.926.000	99,94
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	261.685.000	241.698.500	92,36
	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu	115.247.000	85.968.279	74,59
	Fasilitasi dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	67.639.000	65.519.000	96,87
	Rapat Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan	218.493.800	205.352.415	93,99
	Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu	314.042.350	282.118.388	89,83
	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penyaluran Penggunaan Dana Tidak Terduga	56.865.000	55.445.000	97,50
13	Program Penguatan LSM, Ormas dan Organisasi Sosial Politik	118.948.000	85.678.023	72,03
	Pembinaan Ormas, OKP dan LSM	68.054.000	34.897.523	51,30
	Tim Pemeriksaan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	50.894.000	50.780.500	99,78
14	Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	351.786.000	337.505.021	95,94
	Fasilitasi Pengembangan Promosi produk unggulan daerah	279.062.000	268.271.421	96,13
	Fasilitasi Penyusunan kebijakan penyertaan modal daerah	72.724.000	69.233.600	95,20
15	Peningkatan dan pengembangan Bidang Sosial	4.402.794.000	4.190.048.941	95,17
	Pembinaan Usaha kesehatan sekolah	233.250.200	232.300.200	99,59
	Monitoring dan evaluasi bidang Sosial	140.838.500	139.038.500	98,72
	Fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji	410.308.000	408.754.967	99,62
	Fasilitasi penerimaan Mahasiswa Beasiswa Kedokteran	200.388.000	196.057.700	97,84
	Penyelenggaraan rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	100.534.000	100.504.100	99,97
	Penyelenggaraan Senam Pagi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu	124.525.000	123.025.000	98,80
	Kegiatan penunjang hibah dan bansos	229.802.800	206.052.400	89,66
	kegiatan keagamaan dan kebudayaan	488.113.400	485.326.000	99,43

	Fasilitasi Pelaksanaan Halal Bi Halal	113.960.000	113.960.000	100,00
	Fasilitas Pelaksanaan Ibadah Haji	824.500.000	824.080.000	99,95
	Buka Puasa bersama	123.444.800	123.369.800	99,94
	Fasilitas Ziarah dan umrah	959.588.800	958.736.800	99,91
	Antar jemput jamaah haji	100.892.000	92.476.950	91,66
	Fasilitasi Kegiatan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Lainnya	275.308.500	114.657.924	41,65
	Bimbingan Teknis Usaha Kesehatan Sekolah	77.340.000	71.708.600	92,72
16	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.798.306.500	2.469.774.030	88,26
	Pengadaan Tanah keperluan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	1.389.904.000	1.082.228.779	77,86
	Monitoring dan evaluasi tanah Pemkab kab kh	126.478.000	126.427.300	99,96
	Pengurusan sertifikasi Tanah Pemkab.Kh	393.565.500	383.165.300	97,36
	Inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah	710.048.000	699.706.177	98,54
	Fasilitasi Penataan Batas Antar Kabupaten dan Batas Kecamatan	178.311.000	178.246.474	99,96
17	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	1.112.448.000	1.065.423.355	95,77
	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	1.112.448.000	1.065.423.355	95,77
18	Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.172.092.700	1.149.574.799	98,08
	Penyusunan LPPD dan EKKPD, EKPOD	249.965.000	249.745.489	99,91
	Inventarisasi Data Rupabumi kecamatan	114.782.500	111.122.500	96,81
	Rapat Koordinasi bidang Pemerintahan	352.785.000	352.745.244	99,99
	Rapat Kerja Perangkat Daerah	125.194.000	109.966.450	87,84
	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	99.917.000	96.545.916	96,63
	Study Pembelajaran Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Administrasi Kecamatan	229.449.200	229.449.200	100,00
19	Kerjasama Informasi Dan Media Massa	1.165.541.500	1.153.583.544	98,97

	Kerjasama Berita dengan media cetak	830.000.000	830.000.000	100,00
	Penyebarluasan Informasi Pemerintahan dan Pembangunan	138.541.500	138.084.544	99,67
	Pencitraan dan Publikasi Pemerintah	197.000.000	185.499.000	94,16
20	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	216.950.000	184.171.400	84,89
	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	86.820.000	83.638.400	96,34
	Peningkatan kesadaran masyarakat dan Cinta Tanah Air	130.130.000	100.533.000	77,26
21	Pemeliharaan KANTRANTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal	299.983.000	197.641.300	65,89
	Pencegahan dan Deteksi Dini AGHT (KOMINDA)	187.200.000	99.345.900	53,07
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Penyalahgunaan Narkotika	112.783.000	98.295.400	87,15
22	Pengembangan wawasan kebangsaan	821.548.000	764.257.000	93,03
	Penguatan Jaringan FKDM	92.235.000	91.097.800	98,77
	Fasilitasi Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	-	-	-
	Fasilitasi Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	64.976.000	62.271.000	95,84
	Penguatan Tim Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	95.223.000	46.480.000	48,81
	Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Dalam Negeri	427.695.000	424.993.400	99,37
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Luhur Budaya Bangsa	76.893.000	75.038.800	97,59
	Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila	64.526.000	56.901.000	88,18
23	Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	-	-	-
	Penyediaan Listrik Perdesaan	-	-	-
24	Program Pendidikan Politik Masyarakat	350.400.000	326.462.900	93,17
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	350.400.000	326.462.900	93,17

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Dengan melihat gambaran capaian kinerja masing –masing program pada penjelasan bab sebelumnya mengenai akuntabilitas kinerja, maka terlihat bahwa hampir seluruh dana yang dialokasikan terserap semuanya, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan keterbatasan waktu dan berbagai faktor penghalang lainnya.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance serta memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan umum, maka langkah – langkah antisipatif yang telah dilaksanakan antara lain dengan terus mensosialisasikan produk-produk hukum, meningkatkan kualitas SDM aparatur, dan meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan umum serta pelayanan administrasi. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang tercermin dalam capaian kinerja program yang telah dilaksanakan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Namun hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Meskipun demikian, berbagai kebijakan dan program perlu ditelaah kembali untuk mencapai cita-cita pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. LAKIP perlu dijadikan salah satu sumber pertimbangan pembuatan kebijakan dan program ditahun 2019 dan tahun – tahun sesudah nya agar meningkatkan kualitas dan manfaat yang tercermin pada kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan.

B. SARAN

LAKIP perlu dijadikan salah satu sumber pertimbangan pembuatan kebijakan dan program ditahun 2019 dan tahun – tahun selanjutnya agar dapat meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.